

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama dilakukan oleh Dewi & Putra (2016) bertujuan agar mendapatkan terkait bukti yang empiris perihal pengaruh mekanisme *corporate governance* pada integritas laporan keuangan. Pada penelitian ini *corporate governance* diprosikan dengan menggunakan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajemen, Komisaris Independen dan Komite Audit, kemudian untuk variabel dependen integritas pada laporan keuangan diukur menggunakan indeks konservatisme. *Sampling* yang digunakan pada merupakan sampel perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI ditahun 2011 sampai 2013 dengan penggunaan metode *purposive sampling*. Kemudian total sampel yang diperoleh adalah 72 pengamatan. Analisis regresi linier berganda adalah metode yang digunakan pada penelitian ini, yang memperlihatkan bila Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen juga komisaris independen mempengaruhi secara positif pada integritas laporan keuangan, namun komite audit tidak mempengaruhi pada Integritas laporan keuangan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Mais & Nuari (2016) bertujuan sebagai pengujian adakah pengaruh *good corporate governance* dengan proksi menggunakan komisaris independen dan kepemilikan institusional, ukuran perusahaan pada integritas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan sektor pertambangan yang telah terdaftar di BEI tahun 2012 sampai dengan 2015. *Purposive sampling* adalah metode yang digunakan dengan menggunakan total sampel pada perusahaan sektor pertambangan sebanyak 11 perusahaan, menjadikan jumlah sampel yang tersedia adalah 44 sampel amatan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bila komisaris independen mempengaruhi secara positif terhadap integritas laporan

keuangan. Namun kepemilikan institusional mempunyai nilai yang negatif terhadap integritas laporan keuangan. Dan juga ukuran perusahaan tidak terbukti mempengaruhi integritas laporan keuangan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mudasetia & Nur (2017) bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh independensi, mekanisme *corporate governance* (persentase kepemilikan institusi saham, persentase kepemilikan saham manajemen, komite audit, komisaris independen) dan kualitas audit dan pengaruhnya terhadap integritas laporan keuangan. Populasi pada penelitian ini ialah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI pada tahun 2011 sampai 2015. Sampel yang dipakai pada penelitian sejumlah 39 perusahaan sehingga diperoleh sampel sebanyak 195 amatan observasi dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasilnya adalah Independensi, Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajemen, Komite audit, komisaris independen terbukti tidak mempengaruhi signifikan pada integritas laporan keuangan. Namun untuk Kualitas audit terbukti mempengaruhi secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Inosensius dkk (2017) bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur *corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI ditahun 2009 sampai 2014. Jumlah sampel yang dipakai pada penelitian ini ialah 18 perusahaan. Metode yang digunakan adalah *Purposive sampling*. Hasilnya memperlihatkan jika kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Siahaan (2017) bertujuan untuk menganalisis apakah pengaruh dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, kualitas KAP, ukuran perusahaan terhadap integritas pada laporan keuangan. Data yang dipakai untuk penelitian ini adalah dengan data studi dokumentasi, yakni pengambilan data menggunakan cara mempelajari catatan-

catatan dan dokumen perusahaan, seperti data-data laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur yang sudah terdaftar di BEI melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Dengan ini menghasilkan komite audit berpengaruh secara signifikan pada integritas laporan keuangan. Tetapi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, kualitas KAP, ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan pada integritas laporan keuangan.

Penelitian keenam dilakukan di Negara Nigeria oleh Paulinus, *et. al.* (2017) bertujuan untuk meneliti secara empiris tata kelola perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan di Nigeria. Dengan menggunakan 15 perusahaan yang terdaftar di pasar bursa saham Nigeria pada sektor barang konsumen periode 2012-2016. Dalam menguji hipotesis, penelitian ini mengadopsi teknik regresi sederhana untuk perusahaan sampel yang dianalisis. Dengan hasil analisis yakni dengan adanya mekanisme *corporate governance* meliputi kepemilikan saham institusional, komposisi dewan, komite audit, independensi dewan dapat memberikan efek atau dampak yang baik pada kualitas laporan keuangan di Nigeria.

Penelitian ketujuh dilakukan di Negara Malaysia oleh Arshad dan Razali (2017) bertujuan untuk memeriksa hubungan antara struktur tata kelola perusahaan dan kemungkinan pelaporan keuangan palsu. Kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan didasarkan pada integrasi model Beneish M-score dan model Z-score Altman. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan dari 227 Perusahaan Publik terdaftar di Malaysia untuk tahun 2010-2011. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa efektivitas struktur tata kelola perusahaan mengurangi kemungkinan pelaporan keuangan yang curang. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur tata kelola perusahaan yang efektif sangat penting dalam meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan.

Penelitian kedelapan yang dilakukan di Yordania oleh Al-Hajaya (2019) bertujuan untuk meneliti efek dari karakteristik kualitas audit dan komite audit (yang diukur dari biaya audit dan juga jenis agen audit/KAP) sebagai alat dari tata kelola perusahaan. Penelitian ini menggunakan data dari 23 perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Yordania periode tahun 2013-2017. Dan menunjukkan hasil

bahwa perusahaan dengan komite audit yang lebih besar dan mengandung proporsi jumlah direktur non-eksekutif dan direktur independen yang tinggi lebih cenderung menggunakan agen audit/KAP Big-four sehingga menggunakan biaya yang lebih banyak dan menandakan tingkat kualitas audit mereka yang baik. Sebaliknya, perusahaan dengan komite audit yang lebih kecil cenderung memilih KAP non-big four sehingga biaya yang dibutuhkan lebih rendah.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Agensi (Agency Theory)**

Agensi teori adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan diantara prinsipal dan agen. Pemegang saham dan *agent* dalam hal ini sebagai manajemen yang mengelola perusahaan. Adanya pemisahan kepentingan diantara prinsipal sebagai pemilik/pemegang dana & agen sebagai manajemen itu disebut dengan Teori agensi. Prinsipal akan memberi mandate kepada agen untuk mengelola perusahaan dengan baik. Dengan adanya pemisahan mandate yang diberikan dari prinsipal kepada agen yakni agar prinsipal bisa mendapatkan laba atau keuntungan semaksimal dan sebanyak mungkin pada biaya yang seefisien dan seminimal mungkin pada saat perusahaan dikelola oleh agen.

Hubungan keagenan yang terjadi menurut Hamdani, (2016:30) adalah kontrak diantara manager (*agent*) dan investor/pemilik dana (*principal*). Agen diberikan di kontrak agar mengerjakan tugas tertentu kepada pemilik (*principal*) dan memiliki tanggungjawab untuk tugas-tugas yang telah diberi dari pemilik (*principal*). Adanya perbedaan kepentingan yang terjadi antara agen dan *principal* yaitu diasumsikan bahwa *principal* hanya tertarik pada pembayaran deviden saja dan tidak menginvestasikan lagi. Sedangkan, agen diasumsikan menginginkan dividen yang sudah dibayarkan dapat di investasikan kembali agar menambahkan modal perusahaan tersebut (Pristiawan, 2016).

Berdasarkan keterangan diatas telah dijelaskan bahwa teori keagenan terjadi antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai principal. Yang mana duaduanya sama-sama menginginkan untuk memaksimalkan kemakmurannya masing-masing, namun pihak agen lebih memiliki keunggulan dari segi informasi dibandingkan dari pihak principal, dikarenakan pihak agenlah yang mengelola perusahaan secara langsung sedangkan pihak prinsipal cukup sulit mendapatkan informasi yang efektif mengenai operasional perusahaan. Ketidaksamaan penguasaan ini yang bisa menimbulkan kondisi asimetri informasi.

Untuk menghadapi jika adanya konflik keagenan bisa dikurangi dengan adanya *Corporate Governance* yakni kepemilikan institusional dan juga komisaris independen. Dengan adanya *corporate governance* tersebut diharap bisa berguna untuk memberi kepercayaan pada para *stakeholders*.

## **2.2.2. Corporate Governance**

### **2.2.2.1. Pengertian Corporate Governance**

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *corporate governance* ialah suatu seperangkat dari peraturan yang berfungsi untuk mengatur relasi hubungan diantara lain pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, juga pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kaitan dengan hak serta kewajiban atau istilah lainnya *corporate governance* adalah sebuah sistem untuk pengendalian perusahaan, yang mana juga bertujuan agar terciptanya nilai tambah bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan, (Effendi, 2016:3).

Sedangkan menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 pada tanggal 1 Agustus 2011 *Good Corporate Governance* merupakan sebuah proses yang tersusun dan digunakan oleh organisasi BUMN agar dapat meningkatkan kembali keberhasilan suatu usaha juga suatu akuntabilitas sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham pada jangka waktu yang panjang dan

memperhatikan keperluan pemegang saham yang lainnya dan berlandaskan aturan undang-undang dan nilai etika.

### **2.2.3. Tujuan *Corporate Governance***

#### **2.2.3.1. Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance***

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* tujuan dari adanya *corporate governance* ialah agar terciptanya nilai lebih untuk seluruh dari pihak yang berkepentingan. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk:

Memberikan aturan hubungan antara dewan komisaris, direksi jugapemegang saham.

- 1) Untuk mencegah terjadi kesalahan secara signifikansi didalam strategi korporasi. Korporasi merupakan sebuah mekanisme yang di bangun untuk pihak-pihak agar memberikan kontribusi-kontibusi seperti tenaga, keahlian, juga modal demi kepentingan bersama.
- 2) Memberikan kepastian jika apabila ada kesalahan yang terjadi bisa di perbaiki dengan cepat sesegera mungkin.
- 3) Bisa meningkatkan kinerja keuangan, mengurani risiko yang bisa saja dilakukann pada dewan dengan keputusan menguntungkan diri sendiri, *corporate governance* bisa menambahkan tingat kepercayaan bagi investor.

### **2.2.4. Penjelasan variabel *Corporate governance***

Konflik keagenan dapat dikurangi dengan menggunakan *Corporate Governance* pada penelitian ini. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut ini:

#### **1. Kepemilikan Institusional (INST)**

Proporsi jumlah saham perusahaan yang di miliki institusi berupa lembaga yakni asuransi perusahaan, investasi, bank, dan yang lainnya. Kepemilikan institusional juga mempunyai peran untuk mengawasi agen untuk menjalankan pengawasannya secara optimal pada perilaku manajemen

pada saat menjalani tugas dan peran dalam pengelolaan perusahaannya. *Monitoring* bisa menjamin kemakmuran bagi para *stakeholders*, Sugiarto (2011:46).

Kepemilikan Institusional (INST) diukur menggunakan rasio *Institutional Ownership*. *Institutional Ownership* adalah kepemilikan saham suatu perusahaan yang mana dimiliki oleh suatu institusi ataupun lembaga berupa perusahaan bank, investasi, asuransi, bank, dan lainnya diukur menggunakan presentase total saham yang dimiliki oleh pihak institusional (Haruman, 2008).

Penelitian sebelumnya dilakukan Inosensius dkk (2017) menggunakan indikator perhitungan INST :

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}} \times 100\%.$$

Indikator perhitungan tersebut hampir sama tetapi sedikit berbeda oleh penelitian juga dilakukan oleh Siahaan (2017) yakni menggunakan indikator perhitungan INST :

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}}$$

## 2. Komisaris Independen (KIND)

Anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga, kepengurusan, dan hubungan keuangan pada anggota dewan komisaris lain, direksi juga *stakeholders* pengendali atau hubungan lainnya yang bisa berpengaruh pada kemampuan untuk bertindak secara independen, (Agoes, 2014:28).

Menurut Peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 57/POJK/2017 menjelaskan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan

komisaris dimana berasal dari luar perusahaan efek dan juga dapat memenuhi syarat menjadi komisaris Independen. Pada peraturannya bahwa syarat untuk menjadi dewan komisaris adalah 2 orang, dan presentase jumlah komisaris independen harus dan wajib setidaknya paling sedikit 30% dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris.

Berikut persyaratan yang harus dimiliki komisaris independen adalah :

- a. Tidak termasuk yang bekerja ataupun memiliki wewenang juga tanggungjawab untuk memimpin, mengendalikan, ataupun mengawasi pada perusahaan tersebut selama 6 bulan terakhir, terkecuali jika pengangkatan yang dilakukan kembali menjadi komisaris independen periode selanjutnya.
- b. Tidak memiliki saham efek, baik secara langsung ataupun tidak pada perusahaan tersebut.
- c. Tidak memiliki korelasi hubungan afiliasi antara perusahaan, anggota dewan, komisaris, anggota direksi ataupun pemegang saham pengendali perusahaan tersebut.
- d. Tidak memiliki korelasi hubungan berusaha baik langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan efek.

Menurut penelitian terdahulu Dewi & Putra (2016) dan Inosensius dkk (2017) menggunakan indikator perhitungan yang sama untuk Komisaris Independen yakni membandingkan seluruh total anggota dewan komisaris bukan yang berasal dari dalam perusahaan efek (independen) dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan berdasarkan sampel.

$$\text{KIND} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota dewan komisaris}}$$



### 2.2.5. Kualitas Audit (KA)

Baik atau tidaknya suatu pemeriksaan laporan keuangan yang sudah dilakukan oleh auditor disebut Kualitas audit. Standar Profesional Akuntansi Publik (ASAP) menyatakan audit yang di laksanakan oleh auditor bisa dikatakan itu berkualitas apabila dapat memenuhi ketentuan, kriteria atau standar audit lainnya. Standar pengauditan yakni mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan yang digunakan pada saat pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Kualitas dari audit bisa ditentukan dengan 2 hal yakni independensi juga kompetensi. Kesimpulannya bahwa auditor dengan memiliki kompeten adalah auditor yang “mampu” menemukan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, sedangkan auditor disebut independen adalah auditor yang "mau" mengungkap apabila terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. (Christiawan, 2009)

Dari penelitian mengenai kualitas audit yang sudah dibahas bisa ditarik kesimpulan yakni kualitas audit adalah kemungkinan auditor dalam mengaudit laporan keuangan kliennya, juga dapat mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang bisa saja terjadi dalam sistem akuntansi kliennya dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditor, dimana pada saat melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntansi publik yang relevan.

Penelitian yang terdahulu oleh Siahaan (2017) dan Mudasetia & Solikhah (2017) menggunakan indikator perhitungan Kualitas audit yang sama yakni dilihat dari skala Kantor Akuntan Publik. Apabila sebuah KAP mengklaim dirinya sebagai KAP besar seperti yang dilakukan oleh *big four firms* dan *non big four firms*, maka mereka juga akan berusaha keras untuk menjaga nama besar tersebut, serta menghindari tindakan yang bisa mengganggu nama besar mereka. Ukuran KAP bisa diukur berdasarkan jumlah klien dan presentase dari *audit fee* untuk usaha mempertahankan kliennya agar tidak berpindah pada perusahaan audit yang lainnya.

### 2.2.6. Ukuran Perusahaan

Menurut Prasetyorini (2013: 186) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala dimana diklasifikasikannya besar atau kecilnya perusahaan tersebut dengan berbagai cara, diantaranya menggunakan total aktiva, *long size*, nilai pasar saham dan lainnya. Ukuran perusahaan di jelaskan oleh Prasetyorini (2013:56) sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, data yang lainnya”.

Ukuran perusahaan adalah menunjukkan total anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan untuk usaha mencapai tujuan, Torang (2012:93)

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan dan nilai aktiva, Riyanto (2013:313)

Dari semua definisi diatas, maka penulis bisa menarik kesimpulan jika ukuran perusahaan adalah nilai besar kecilnya perusahaan yang dilihat oleh total aset, total penjualan, total laba, sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan dan menyebabkan tercapainya tujuan perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi & Putra (2016), Mais & Nuari (2016) dan Siahaan (2017) menggunakan indikator perhitungan yang sama untuk ukuran perusahaan yakni besar atau kecilnya sebuah perusahaan dapat dilihat dari total aset. Ukuran perusahaan dihitung berdasarkan total aset perusahaan sampel. Ukuran perusahaan juga mempunyai pengaruh dalam menghasilkan laporan keuangan, perusahaan berskala besar cenderung mempunyai manajemen yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dibandingkan perusahaan berskala kecil.

### 2.2.7. Integritas Laporan Keuangan.

Integritas Laporan Keuangan adalah suatu penyajian serta pengungkapan laporan keuangan dengan didalamnya berisikan data-data akuntansi yang mampu menggambarkan realitas sesungguhnya dari ekonomi perusahaan yang diungkapkan dengan jujur tanpa ada yang ditutupi.

Bagian dari proses pelaporan keuangan disebut laporan keuangan. Biasanya laporan keuangan yang lengkap terdapat didalamnya neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, catatan juga laporan lainnya serta materi penjelasan adalah termasuk dalam bagian dari integritas laporan keuangan. (PSAK) No. 1(2015:2)

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 2 ada 2 hal menjadi kualitas primer pada suatu laporan keuangan, yaitu relevansi (*relevance*) dan keandalan (*reability*).

Relevansi adalah sejauh mana laporan keuangan didalamnya harus memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan penguuna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa depan. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang merekam setiap transaksi bisnis selama satu periode akuntansi.

Laporan keuangan dapat dikatakan berintegras bila laporan keuangan tersebut memiliki kualitas *reability* juga sama seperti prinsip akuntansi umum (Kieso, 2013:45). *Reability* memiliki kualitas sebagai berikut :

1. *Verifiability*

Laporan keuangan sebuah entitas yang memiliki kondisi yang sama seperti laporan keuangan entitas lain, akan memberikan opini yang sama bila diaudit oleh auditor yang berbeda.

2. *Representational faithfulness*

Angka keterangan disajikan seperti apa yang ada dan juga benar-benar terjadi.

### 3. *Neutrality*

Informasi wajib diarahkan kepada kebutuhan umum yang dimaknai, dan tidak dengan bergantung dengan kebutuhan juga dengan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh adanya usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Siahaan (2017) menggunakan indikator perhitungan untuk penelitian menggunakan model indeks *conservatisme*, yang dikemukakan oleh Penmann dan Zhang (2002) menerangkan bahwa kualitas laba yang dihasilkan tergantung dari pertumbuhan investasi perusahaan. Variabel pengukuran integritas informasi laporan keuangan yang menggunakan indeks konservatisme *Cskor*.

$$C_{it} = \frac{(RP_{it} + DEPR_{it})}{NOA_{it}}$$

#### **Keterangan:**

$C_{it}$  = Indeks *conservatisme* perusahaan *i* pada tahun *t*.

$RP_{it}$  = jumlah biaya riset dan pengembangan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan *i* pada tahun *t*.

$DEPR_{it}$  = biaya depresiasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan *i* pada tahun *t*.  $NOA_{it}$  = *net operating assets*, yang diukur dengan rumus kewajiban keuangan bersih (total utang + total saham + total dividen) – (kas + total investasi) perusahaan *i* pada tahun *t*.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Widarno (2019) dan juga Lubis (2018) menggunakan indikator pengukuran indeks konservatisme dihitung dengan Model Beaver & Ryan yang digunakan juga oleh yaitu menggunakan Market to Book Ratio yaitu :

$$ILKit = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$

**Keterangan :**

*ILKit* : Integritas Laporan Keuangan Perusahaan I pada tahun 1

Harga Pasar Saham : Harga saham pada 31 Desember

Nilai Buku Saham : Total Ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar

## **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Kepemilikan Institusional adalah jumlah saham perusahaan yang di miliki institusi berupa lembaga yakni asuransi perusaan, investasi, bank, dan yang lainnnya. Kepemilikan institusional juga mempunyai peran untuk mengawasi agen untuk menjalankan pengawasannya secara optimal pada perilaku manajemen pada saat menjalani tugas dan peran dalam pengelolaan perusahaannya.

Berdasarkan penelitian Mudasetia & Solikhah (2017) bahwa Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan pada integritas laporan keuangan. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitiann Dewi & Putra (2016) yang menghasilkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara positif pada integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H1 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Integritas**

## **Laporan keuangan.**

### **2.3.2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Komisaris independen berdasarkan BAPEPAM No. Kep 29/PM/2004 adalah : “Anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung melalui emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.”

Penelitian yang dilakukan oleh Mais & Nuari (2016) bahwa Komisaris independen mempengaruhi secara positif pada integritas Laporan keuangan. Penelitian itu sejalan seperti di lakukan oleh Dewi & Putra (2016) komisaris independen mempengaruhi positif pada integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H2 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.**

### **2.3.3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan**

KAP ada dua macam yaitu KAP yang sudah berskala besar dan KAP yang masih berskala kecil. KAP berskala besar cenderung lebih independen daripada KAP yang berskala masih kecil. Jadi makin tinggi kualitas audit juga makin besar KAP akan menjadikan integritas laporan keuangan yang di hasilkan menjadi semakin baik pula. KAP besar akan menghindari hal yang bisa merusak reputasinya.

Penelitian sebelumnya mengukur kualitas auditor berdasarkan KAP *big four* seperti penelitian yang dilakukan oleh Mudasetia & Solikhah (2017) bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan pada integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H3 : Kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.**

#### **2.3.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Ukuran perusahaan bisa dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan dengan jumlah aset besar dapat mencerminkan kondisi perusahaan tersebut baik juga biasanya memiliki kondisi keuangan lebih stabil.

Penelitian dilakukan sebelumnya oleh Siahaan (2017) bahwa Ukuran Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan pada integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.**

#### **2.4. Kerangka Konseptual Penelitian**

Pada kenyataannya, kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi sudah meningkat dari beberapa tahun terakhir ini. Dengan ini memperlihatkan bahwa informasi di sampaikan pada laporan keuangan tersebut tidak berintegritas bagi para pengguna internal maupun eksternal. Dengan Timbulnya kasus-kasus tersebut menimbulkan banyak pertanyaan untuk beberapa pihak. Diantaranya yaitu tentang tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan peranan pihak auditor pada laporan keuangan.

Pada tinjauan pustaka juga penelitian terdahulu, maka dengan ini peneliti menggunakan variabel yang *corporate governance* (yakni : kepemilikan institusional, komisaris independen ), kualitas audit dan ukuran perusahaan untuk variabel independen penelitian ini. Untuk membantu dan memahami *corporate governance* , kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh pada integritas laporan keuangan dibutuhkan sebuah pemikiran. Sehubungan dengan landasan dari teori yang telah dibahas diatas. Kemudian penulis menyusun hipotesis pemikiran, lalu di gambarkan pada kerangka teoritis.

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

**Hubungan Antara Corporate Governance, Kualitas Audit, dan juga Ukuran Persahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan**

